



PEMERINTAH KOTA MALANG



LAPORAN KINERJA TAHUNAN

2015

Beautiful
MALANG

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang memuat informasi kinerja Pemerintah Kota Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada tahun 2015.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Malang, Maret 2016
WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang.....	1
B. Aspek Strategis Pemerintah Kota Malang.....	9
C. Isu-isu Strategis.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Pengukuran Kinerja	33
1. Capaian Kinerja Tujuan	35
2. Capaian Kinerja Sasaran	43
3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya.....	67
4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen yang Merupakan Kemajuan Pencapaian Target Jangka Menengah.....	74
5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Daerah Sekitar.....	83
B. Akuntabilitas Keuangan	88
C. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran.....	99
BAB IV PENUTUP	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103



PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT

Jl. GAJAHMADA No. 2A MALANG, Telp. (0341) 364450-321276

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2015

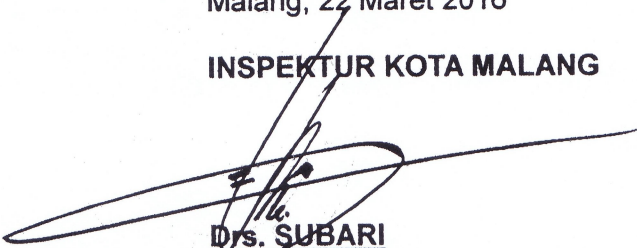
Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kota Malang untuk tahun anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 jo. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Malang, 22 Maret 2016

INSPEKTUR KOTA MALANG



Drs. SUBARI

Pembina Utama Muda

NIP.19570117 198303 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang.....	1
B. Aspek Strategis Pemerintah Kota Malang.....	9
C. Isu-isu Strategis.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Pengukuran Kinerja	33
1. Capaian Kinerja Tujuan	35
2. Capaian Kinerja Sasaran	43
3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya.....	67
4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen yang Merupakan Kemajuan Pencapaian Target Jangka Menengah.....	74
5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Daerah Sekitar.....	83
B. Akuntabilitas Keuangan	88
C. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran.....	99
BAB IV PENUTUP	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103

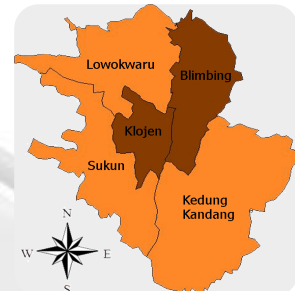
BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MALANG

1. Letak Geografis

Kota Malang merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya memiliki wilayah seluas 110,06 km², terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Kota Malang terletak pada koordinat 7.06° - 8.02° Lintang Selatan dan 112.06° - 112.07° Bujur Timur dengan ketinggian antara 440 – 667 meter dari permukaan laut. Karena letaknya yang cukup tinggi, kondisi iklim Kota Malang tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,0°C sampai dengan 24,8°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 31,4°C dan suhu minimum 17,2°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 66% - 83%, dengan kelembaban maksimum 98% dan minimum mencapai 19% serta curah hujan tertinggi 385 milimeter. Kondisi iklim demikian membuat Kota Malang relatif sejuk dibandingkan dengan daerah-daerah lain.



2. Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif wilayah Kota Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;

- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan, Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Wagir;
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pembagian wilayah administratif di Kota Malang adalah :

- Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan,
89 RW, 675 RT;
- Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan,
127 RW, 923 RT;
- Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan,
114 RW, 870 RT;
- Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan,
94 RW, 869 RT;
- Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan,
120 RW, 774 RT.

Jumlah penduduk Kota Malang pada akhir tahun 2015 berdasarkan data Penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebanyak 881.794 termasuk penduduk WNA pemegang ijin tinggal tetap. Sedangkan dalam pengukuran laporan ini yang diperhitungkan adalah jumlah penduduk WNI sebanyak 881.123 jiwa, yang tersebar di 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, 544 RW dan 4.111 RT.

3. Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Malang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2014, yang terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinasi :
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum;
 - c) Bagian Organisasi;
- 3) Asisten Administrasi Pembangunan, mengkoordinasi :
 - a) Bagian Pembangunan;
 - b) Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;
 - c) Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal;
- 4) Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasi :
 - a) Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Bagian Umum;
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 5) Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Keuangan;
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
 - d) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- 6) Staf Ahli :
 - a) Bidang Hukum dan Politik;
 - b) Bidang Pemerintahan;
 - c) Bidang Pembangunan;
 - d) Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e) Bidang Ekonomi dan Keuangan;

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 4) Dinas Perhubungan;
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 7) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan;
- 8) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- 9) Dinas Pasar;
- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 11) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Dinas Pertanian;
- 13) Dinas Pendapatan Daerah;
- 14) Dinas Sosial;
- 15) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 4) Badan Kepegawaian Daerah;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- 6) Badan Lingkungan Hidup;
 - 7) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 8) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 9) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
 - 10) Kantor Ketahanan Pangan;
- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang membagi Wilayah Daerah menjadi 5 (lima) Kecamatan, yaitu :
- 1) Kecamatan Klojen, terdiri dari :
 - a) Kelurahan Klojen;
 - b) Kelurahan Rampalcelaket;
 - c) Kelurahan Samaan;
 - d) Kelurahan Kiduldalem;
 - e) Kelurahan Sukoharjo;
 - f) Kelurahan Kasin;
 - g) Kelurahan Kauman;
 - h) Kelurahan Oro-oro Dowo;
 - i) Kelurahan Bareng;
 - j) Kelurahan Gadingkasri;
 - k) Kelurahan Penanggungan.
 - 2) Kecamatan Blimbing, terdiri dari :
 - a) Kelurahan Balarjosari;
 - b) Kelurahan Arjosari;
 - c) Kelurahan Polowijen;

- d) Kelurahan Purwodadi;
 - e) Kelurahan Blimbing;
 - f) Kelurahan Pandanwangi;
 - g) Kelurahan Purwantoro;
 - h) Kelurahan Bunulrejo;
 - i) Kelurahan Kesatrian;
 - j) Kelurahan Polehan;
 - k) Kelurahan Jodipan.
- 3) Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari :
- a) Kelurahan Kotalama;
 - b) Kelurahan Mergosono;
 - c) Kelurahan Bumiayu;
 - d) Kelurahan Wonokoyo;
 - e) Kelurahan Buring;
 - f) Kelurahan Kedungkandang;
 - g) Kelurahan Lesanpuro;
 - h) Kelurahan Sawojajar;
 - i) Kelurahan Madyopuro;
 - j) Kelurahan Cemorokandang;
 - k) Kelurahan Arjowinangun;
 - l) Kelurahan Tlogowaru.
- 4) Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari :
- a) Kelurahan Tunggulwulung;
 - b) Kelurahan Merjosari;
 - c) Kelurahan Tlogomas;
 - d) Kelurahan Dinoyo;
 - e) Kelurahan Sumbersari;
 - f) Kelurahan Ketawanggede;
 - g) Kelurahan Jatimulyo;
 - h) Kelurahan Tunjungsekar;

- i) Kelurahan Mojolangu;
 - j) Kelurahan Tulusrejo;
 - k) Kelurahan Lowokwaru;
 - l) Kelurahan Tasikmadu.
- 5) Kecamatan Sukun, terdiri dari :
- a) Kelurahan Ciptomulyo;
 - b) Kelurahan Gadang;
 - c) Kelurahan Kebonsari;
 - d) Kelurahan Bandungrejosari;
 - e) Kelurahan Sukun;
 - f) Kelurahan Tanjungrejo;
 - g) Kelurahan Pisangcandi;
 - h) Kelurahan Bandulan;
 - i) Kelurahan Karangbesuki;
 - j) Kelurahan Mulyorejo;
 - k) Kelurahan Bakalankrajan.
- f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur yang melaksanakan tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang sebagai berikut :

Tabel 1

DATA PEGAWAI KOTA MALANG

GOLONGAN RUANG	JUMLAH			%		
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
GOLONGAN I						
I a	52	26	23	0,55%	0,28%	0,24%
I b	482	479	303	5,05%	5,13%	3,14%
I c	70	58	259	0,73%	0,62%	2,68%
I d	411	361	230	4,31%	3,87%	2,38%
Jumlah	1.015	924	815	10,6%	9,90%	8,44%
GOLONGAN II						
II a	388	330	505	4,07%	3,54%	5,23%
II b	961	970	623	10,1%	10,39%	6,45%
II c	565	488	818	5,92%	5,23%	8,47%
II d	204	300	301	2,14%	3,21%	3,12%
Jumlah	2.118	2.088	2.247	22,2%	22,37%	23,27%
GOLONGAN III						
III a	884	854	1201	9,27%	9,15%	12,44%
III b	862	890	950	9,04%	9,53%	9,84%
III c	852	872	873	8,93%	9,34%	9,04%
III d	824	832	809	8,64%	8,91%	8,38%
Jumlah	3.422	3.448	3.833	35,9%	36,93%	39,70%
GOLONGAN IV						
IV a	2.563	2.286	2170	26,9%	24,49%	22,47%
IV b	391	549	549	4,1%	5,88%	5,69%
IV c	25	40	41	0,26%	0,43%	0,42%
IV d	1	0	1	0,01%	0%	0,01%
Jumlah	2.980	2.875	2.761	31,3%	30,80%	28,59%
Jumlah PNS	9.536	9.335	9.656	100%	100%	100%

Sumber data BKD Kota Malang diolah 31 Desember 2015

Berdasarkan Tabel 1 Data Pegawai, dapat digambarkan bahwa pada tahun 2015, Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III merupakan kelompok Golongan PNS yang terbanyak dengan persentase 39,70%. Kemudian diikuti Golongan IV pada tahun 2015 dengan persentase 28,59%, selanjutnya PNS Golongan II pada tahun 2015 dengan persentase 23,27% dan PNS Golongan I pada tahun 2015 dengan persentase 8,44%. Adapun dari keseluruhan PNS pada tahun 2015 sebanyak 9.656 mengalami peningkatan 321 orang atau 3,4% bila dibandingkan tahun 2014 berjumlah 9.335 orang, dimana hal tersebut karena adanya rekrutmen PNS sebanyak 79 orang dan pengangkatan dari PTT K1 dan K2 sebanyak 509 orang, dan terdapat 271 orang PNS yang pensiun.

B. ASPEK STRATEGIS PEMERINTAH KOTA MALANG

Dalam rangka memenuhi amanah rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan dengan lebih sederhana dan cepat sehingga dihasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kota Malang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, belum optimalnya pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, masih adanya kawasan kumuh, kualitas prasarana sarana dan utilitas yang belum memadai, belum optimalnya pengendalian tata ruang kota, sarana dan manajemen transportasi yang kurang memadai, kualitas lingkungan yang

semakin menurun serta reformasi birokrasi yang belum maksimal di bidang tata pemerintahan.

Dalam upaya mewujudkan harapan-harapan yang harus bisa diatasi tersebut, Pemerintah Kota Malang memiliki faktor-faktor strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada antara lain yaitu :

1. Letak geografis yang strategis di pusat wilayah Malang Raya.

Malang Raya adalah salah satu kawasan yang terdiri dari tiga daerah pemerintahan (Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang) yang saling bertautan dimana antara daerah satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan baik dalam hal kegiatan lalu lintas ekonomi (industri pariwisata, hasil produksi pertanian, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya), sosial, budaya maupun politik.

Posisi Kota Malang yang berada di tengah-tengah kawasan Malang Raya memungkinkan akses yang luas dan cepat bagi Kota Malang untuk menjangkau berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan.

2. Memiliki kekayaan sumberdaya manusia yang memadai, terdidik dan angkatan kerja yang berkualitas.

Dilihat dari aspek SDM tingkat pendidikan rata-rata angkatan kerja usia produktif, 35,07 % berpendidikan SMU dan 16,06 % berpendidikan sarjana.

3. Di bidang pendidikan, Kota Malang memiliki 4 perguruan tinggi negeri dan 58 perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah unggulan, balai pelatihan kerja, dan berbagai komunitas pendidikan dengan banyak tenaga ahli dan akademisi, yang dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Kota Malang.

4. Tersedianya lahan yang strategis untuk pengembangan industri yang mendorong perekonomian, investasi serta properti.
5. Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, toko modern dan pasar tradisional, sekolah, kampus, sarana olah raga, sarana transportasi umum, terminal, sarana pejalan kaki, jaringan listrik, prasarana telematika, dan jaringan air bersih yang memadai, termasuk jalur kereta api dan akses menuju bandar udara.
6. Memiliki sarana kesehatan yang memadai terdiri dari Rumah Sakit Umum, rumah sakit swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Apotik, Klinik, Balai Pengobatan, Rumah Obat, dan Laboratorium Medis yang didukung tenaga medis yang memadai.
7. Terdapat media massa yang cukup beragam, seperti koran, media *online*, radio dan televisi swasta. Beragamnya media massa ini menjadikan informasi berkembang dengan baik dan cepat.
8. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan meningkat. Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang mencapai 7,92%.
9. Terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam. Sebagian besar dari UMKM ini mengolah produk-produk lokal dan khas Malang.
10. Terdapat sarana pendukung pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran/rumah makan, agen atau biro perjalanan, *money changer*, situs-situs bernilai sejarah/*heritage*.

11. Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dan pendidikan keagamaan, forum, dan paguyuban masyarakat.

12. Tersedianya tokoh-tokoh potensial (agama, seni, budaya, sosial politik).

Kota Malang memiliki banyak tokoh masyarakat yang berpengaruh, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pengaruh mereka bahkan tidak hanya untuk komunitas mereka sendiri, melainkan juga untuk komunitas lainnya. Realitas ini merupakan potensi yang cukup besar ketika dikaitkan dengan pembangunan di daerah. Manakala terdapat sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu, proses pembangunan akan lebih mudah untuk dilakukan.

13. Kondisi ketertiban sosial Kota Malang yang kondusif bagi berjalannya pembangunan. Di Kota Malang, relatif tidak pernah terjadi konflik horisontal yang mengganggu ketertiban sosial. Meskipun, potensi tersebut cukup banyak mengingat beragamnya latar belakang masyarakat Kota Malang.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD 5 (lima) tahun sebelumnya maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Malang yang dihadapi dan harus diselesaikan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Adanya berbagai dampak dinamika perkembangan kota menuju “kota metropolis”;

Kota Malang sebagai kota besar yang menuju kota metropolis, saat ini sudah dirasakan problematika perkotaan yang berkaitan dengan sarana transportasi, persampahan,

kependudukan, dan drainase perkotaan. Dalam rangka mengatasi problematika tersebut perlu sinergitas dengan wilayah yang berbatasan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu, melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, tata laksana, peningkatan sistem informasi, penegakan hukum dan kerja sama regional.

2. Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas dan tingginya arus urbanisasi;

Kota Malang sebagai kota besar kedua di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi termasuk didalamnya warga yang bukan sebagai penduduk Kota Malang. Penduduk merupakan subyek pembangunan sekaligus obyek pembangunan, sangat diperlukan akurasi data sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menata tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan tata laksana yang didukung sistem informasi administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan.

Kota Malang sebagai bagian wilayah regional di Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak tingginya arus urbanisasi. Agar urbanisasi bisa dikelola sebagai sebuah potensi yang positif perlu langkah-langkah kebijakan yang bersifat kerja sama antar daerah di Malang Raya.

3. Masih tingginya angka kemiskinan;

Angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2014 sebesar 5,20% atau 44.980 penduduk dari 865.011 penduduk Kota Malang. Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk

menurunkan angka kemiskinan sebagai wujud kebijakan *Peduli Wong Cilik* sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut melalui keterlibatan lembaga keuangan, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan program pemberdayaan masyarakat yang didasarkan data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

4. Masih tingginya angka pengangguran;

Kota Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi adanya peningkatan angka pengangguran. Agar pembangunan ekonomi selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Kebijakan yang diambil yaitu dengan menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat.

5. Pelaksanaan *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal;

Esensi terwujudnya *good governance* dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Malang berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

6. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun;

Kualitas kesehatan manusia sangat ditentukan kualitas lingkungan hidup yang ada. Untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan angka harapan usia hidup lebih panjang, Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Langkah kebijakan yang dilakukan melalui pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan penegakan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

7. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan kemitraan dalam penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

8. Globalisasi yang menuntut kualitas SDM yang handal;

Globalisasi merupakan tantangan yang tidak bisa dihindari dan saat ini sudah mulai kita rasakan. Untuk menghadapi tantangan dimaksud perlu peningkatan kualitas SDM di kelurahan sebagai ujung tombak layanan terdepan, serta

meningkatkan daya saing SDM aparatur untuk memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, termasuk tenaga pendidik untuk menyiapkan masyarakat didik yang handal dan punya daya saing secara global. Selain itu diperlukan penguasaan teknologi informasi yang handal oleh SDM aparatur serta dukungan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

9. Peran perempuan yang belum optimal dalam pembangunan;
Pembangunan Kota Malang yang berjalan pesat memerlukan peran perempuan dalam partisipasi untuk lebih mengoptimalkan proses pembangunan. Kebijakan yang akan dilakukan antara lain melalui perluasan kesempatan berusaha serta memprioritaskan pembinaan dan pemberdayaan perempuan, khususnya untuk mendapatkan hak yang sama (kesetaraan gender).

10. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
Meningkatkan kemajemukan warga Kota Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Malang.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Malang termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

11. Potensi kepariwisataan daerah yang belum diberdayakan secara optimal;

Pembangunan pariwisata di Kota Malang sangat potensial, sesuai dengan data BPS, jumlah kunjungan wisata ke Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan potensi yang dimiliki baik dari pendidikan, industri dan perdagangan sangat mendukung untuk pengembangan potensi wisata.

Kebijakan yang dilakukan diarahkan untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata dengan didukung oleh potensi wisata religi, wisata kuliner, dan wisata minat khusus.

12. Pelaku ekonomi sektor informal belum diberdayakan secara maksimal;

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang, maka perlu dikembangkan sektor koperasi, UKM, dan sektor informal. Pembangunan koperasi, usaha kecil menengah, dan sektor informal memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui kemudahan permodalan, kerja sama perbankan, penyediaan zona perdagangan.

13. Pemberdayaan ekonomi sektor formal dan perbaikan iklim investasi;

Investasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Malang dan memerlukan jaminan keamanan dan kepastian hukum serta penyediaan sarana prasarana pendukung investasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan

transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketenteraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, dan infrastruktur pendukung serta penyediaan kawasan industri.

14. Sarana transportasi dan manajemen transportasi yang belum memadai;

Sebagai salah satu kota besar yang mengarah pada kota metropolitan perlu pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, serta peningkatan aksesibilitas bagi barang dan jasa.

Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal serta manajemen transportasi untuk rekayasa lalu lintas, diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa di Kota Malang. Selain itu, pengembangan sistem transportasi di Kota Malang harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah kabupaten/kota yang juga semakin meningkat.

15. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota;

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali.

Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah perlu diupayakan pembangunan rumah secara vertikal, baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat.

Sedangkan pada kawasan kumuh perlu ditingkatkan kualitas hunian, prasarana sarana lingkungan, serta, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Upaya yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip-prinsip *urban management*.

Kebijakan yang dilakukan adalah sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerja sama dengan lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerja sama lainnya.

16. Peningkatan Kualitas Pendidikan;

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kemajemukan warga Kota Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kota Malang.

Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyiapan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan yang dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Upaya lain dalam peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui program pendidikan gratis

tingkat SD dan SMP, serta pendidikan gratis tingkat SMA dan SMK bagi siswa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

17. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban;

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan iklim yang kondusif, tenteram dan tertib, dengan melibatkan semua elemen masyarakat secara optimal melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

Kebijakan yang dilakukan melalui penegakan peraturan perundang-undangan, pengendalian ketenteraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi Kota Malang yang aman, tenteram, tertib dan teratur.

18. Penguatan Ketahanan Pangan;

Permasalahan ketahanan pangan meliputi tiga sub sistem yaitu : ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, lancarnya distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang bermutu. Tantangan ketahanan pangan di Kota Malang adalah menurunnya luas lahan pertanian tanaman pangan yang diakibatkan perkembangan kota.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melakukan diversifikasi bahan pangan dan olahan pangan pengganti bahan pokok.

19. Pengembangan Kerja sama Antar Kota dan Kabupaten;

Untuk lebih memposisikan Kota Malang sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperlukan kerja sama antar kota dan kabupaten di wilayah Malang Raya dengan mengedepankan posisi Kota Malang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerja sama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pengembangan kerja sama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

20. Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan.

Sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari sumber pembiayaan konvensional dan non-konvensional. Sumber pembiayaan konvensional berasal dari pendapatan daerah. Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional berasal dari kerja sama pihak pemerintah daerah dengan *stakeholder* terkait baik swasta maupun masyarakat.

Instrumen pembiayaan non-konvensional ini salah satunya adalah memfasilitasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/ *Corporate Social Responsibilities* (CSR) Badan Usaha yang disinergikan dengan program daerah.

Kebijakan pemenuhan pembiayaan pembangunan dilakukan melalui skema *Public Private Partnership* (PPP), maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta skema lainnya. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam menyusun Perjanjian Kinerja perlu memperhatikan perencanaan strategis yang merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 jo. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah

Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2015, yaitu :

***“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA
BERMARTABAT”***

Sedangkan untuk misi dan tujuan Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan	1. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 2. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah	1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor ekonomi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah 2. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja 3. Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

Misi	Tujuan
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial	1. Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan 2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan kemiskinan 3. Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota 2. Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya
5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	1. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Malang telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2015. Indikator Kinerja Utama tersebut yaitu :

Indikator Kinerja Utama	Target 2015
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,63%
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88,95%
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	93,71%
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	69,00%
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	88,66%
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	62,76%
7. Angka Melek Huruf	99,9%
8. Persentase Angka Kelulusan a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA/SMK	99,22% 99,64% 99,31%
9. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	16%
10. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	16,5
11. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	130
12. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,08
13. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:103
14. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	75%
15. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	70,95
16. Persentase Koperasi Sehat	49,61%
17. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	54,51%

Indikator Kinerja Utama	Target 2015
18. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	39,92%
19. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	32,02%
20. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,90%
21. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	77,50%
22. Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	5%
23. Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	10,86
24. Angka kemiskinan	4,27%
25. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	15%
26. Persentase korban bencana yang tertangani	100%
27. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	74,09
28. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,51
29. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	100%
30. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	15%
31. Persentase penurunan angka kriminalitas	10%
32. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	5%
33. Luasan Kawasan Kumuh	520,00
34. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	95%
35. Persentase layanan air bersih	85,5%
36. Persentase luasan RTH	15,94%
37. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	95%
38. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	100%
39. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	3

Indikator Kinerja Utama	Target 2015
40. Nilai SAKIP Kota Malang	65
41. Opini BPK	WTP
42. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	77,16

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2015. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Pada Tahun 2015, Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.075.265.776.096,77, yang dijabarkan dalam masing-masing sasaran :

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	165.685.870.100,77
2.	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	101.668.446.482,00
3.	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	13.855.219.500,00
4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	24.839.307.000,00
5.	Meningkatnya kesempatan kerja	31.794.630.455,00
6.	Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	2.770.500.000,00
7.	Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	8.504.055.000,00

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)
8.	Menurunnya penduduk miskin	6.820.583.942,00
9.	Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	6.168.609.320,00
10.	Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	1.621.880.000,00
11.	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	10.585.000.000,00
12.	Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	15.924.294.180,00
13.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	11.844.856.225,00
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	310.171.941.000,00
15.	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	24.459.981.400,00
16.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	28.240.303.900,00
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	310.310.297.592,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja diukur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 jo. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015, yang mengamanatkan pengumpulan data kinerja menggunakan Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan formulir isian data kinerja.

Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama yang telah terisi, dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data tersebut. Sedangkan tanggung jawab pengumpulan data kinerja merupakan kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok fungsinya. Adapun penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut :

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Dinas Pendidikan
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Dinas Pendidikan
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Dinas Pendidikan
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Dinas Pendidikan
	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
	6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan
	7. Angka Melek Huruf	Dinas Pendidikan
	8. Angka Kelulusan : - SD - SMP - SMA	Dinas Pendidikan
	9. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	Dinas Pendidikan
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	Dinas Kesehatan
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Dinas Kesehatan
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	Dinas Kesehatan
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	Dinas Kesehatan
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	Dinas Kesehatan
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi sehat	Dinas Koperasi dan UKM
	2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	Dinas Koperasi dan UKM
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Dinas Pertanian
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
	3. Persentase layanan air bersih	PDAM
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
	3. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	Inspektorat
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	3. Opini BPK	Inspektorat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bagian Organisasi

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator tujuan dan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kota Malang dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

- 2) Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah Kota Malang, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	:	Berhasil
$55 \leq X < 70$	:	Cukup Berhasil
$X < 55$	:	Kurang Berhasil

1. Capaian Kinerja Tujuan

Pengukuran kinerja tujuan dilakukan dengan membandingkan target jangka menengah dengan realisasi tahun 2015, sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,63%	95,99%	96,35%
	2. Angka Melek Huruf	99,95%	99,91%	99,96%
	3. Angka Kelulusan			
	- SD	99,25 %	99%	99,30%
	- SMP	99,68 %	99%	98,92%
	- SMA	100%	98%	98,42%

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, dengan indikator tujuan :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, dengan formula indikator jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-12 tahun X 100%, tercapai 96,35% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 99,63% dengan realisasi 95,99% atau sejumlah 79.178 siswa SD dibanding 82.487 jumlah penduduk usia SD.

2. Angka Melek Huruf, dengan formula indikator Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas X 100%, tercapai 99,96% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 99,95% dengan realisasi 99,91% atau diukur dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis sebesar 681.259 dibanding jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 681.869.
3. Angka Kelulusan, dengan formula indikator Jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK) dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran berkenaan X 100%, tercapai :
- SD/MI 99,30% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 99,25 % dengan realisasi 99% atau diukur dari jumlah kelulusan sebesar 14.288 pada tahun 2015 dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan sebesar 681.869.
 - SMP/MTs 98,96% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 98,92% dengan realisasi 99% atau diukur dari Jumlah kelulusan sebesar 11.950 pada tahun 2015 dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan sebesar 12.119.

- SMA/MA, SMK 98,42% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 100% dengan realisasi 98,42% atau diukur dari Jumlah kelulusan sebesar 15.719 pada tahun 2015 dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan sebesar 15.971.

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	71,10	71,14	100,06%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, dengan indikator tujuan :

Angka Usia Harapan Hidup (AHH), tercapai 100,06% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 71,10 dengan realisasi 71,14.

Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah	Persentase koperasi sehat	62,34%	38,06%	61,06%

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah, dengan indikator tujuan :

Persentase koperasi sehat, dengan capaian 61,06% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 62,34% dengan realisasi 38,06%.

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya perluasan kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,59%	1,76%	173,27%
	2. Realisasi nilai penanaman modal dan investasi daerah	890.503.160.543,26	801.628.215.332	90,02%

Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja, dengan indikator tujuan :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan capaian 173,27% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 6,59% dengan realisasi 1,76%
2. Realisasi nilai penanaman modal dan investasi daerah dengan capaian 90,02% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah Rp 890.503.160.543,26 dengan realisasi Rp 801.628.215.332

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	11,01	8,86	80,48%

Tujuan 3 : Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*), dengan indikator tujuan :

Ketersediaan pangan (*food availability*) tercapai 80,48% termasuk kategori **Berhasil**, dimana dari target jangka menengah 11,01 terealisasi 8,86.

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan	Angka kemiskinan	4,27%	4,20%	101,59%

Tujuan 1 : Menurunnya persentase penduduk miskin, dengan indikator tujuan :

Angka kemiskinan, dengan capaian 101,59% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 4,27% dengan realisasi 4,20%.

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	76,49	72,99	95,42%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender, dengan indikator tujuan :

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian 95,42% termasuk kategori **Sangat**

Berhasil, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah IPG 76,49 dengan realisasi 72,99.

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat	Persentase penurunan angka kriminalitas	10%	28,41%	284,15%

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualiatls kerukunan sosial masyarakat, dengan indikator tujuan : Persentase penurunan angka kriminalitas tercapai 284,15% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, dimana dari target jangka menengah 10% terealisasi 28,41%

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota	Predikat Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura	100%
	Predikat Wahana Tata Nugraha	Piala WTN	Piala WTN	100%

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota, dengan indikator tujuan : Predikat Adipura, dengan capaian 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**. Predikat Wahana Tata Nugraha, dengan capaian 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Persentase luasan RTH	15,97%	10,93%	68,5%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang, dengan indikator tujuan :

Persentase luasan RTH, dengan formula indikator Luasan ruang terbuka hijau dibagi luasan wilayah X 100%, dengan capaian 68,5% termasuk kategori **Cukup Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target jangka menengah 15,97% dengan realisasi 10,93% atau 1.203,05 km² dari 110,06 km².

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%

Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator tujuan :

Opini BPK, dengan capaian 100% termasuk kategori Sangat **Berhasil**, yang berasal dari

perhitungan target Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualaian (WTP) terealisasi WTP.

KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2015	CAPAIAN
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,66	79,56	101,1%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan indikator tujuan :

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tercapai 101,1%, dengan perhitungan dari target jangka menengah hasil SKM 78,66 terealisasi 79,56.

2. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Jangka Pendek (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015)

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan (jangka pendek) yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilannya serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :

1) Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,63%	95,99%	96,35%
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88,95%	85,87%	96,54%
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	93,71%	76,83%	81,99%
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	69%	58,52%	84,80%
	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	88,66%	117,39%	132,41%
	6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	62,76%	90,89%	144,83%
	7. Angka Melek Huruf	99,90%	99,91%	100,01%
	8. Angka Kelulusan			
	- SD	99,22%	99%	99,33%
	- SMP	99,64%	99%	98,96%
	- SMA	99,31%	98%	99,11%
	7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	16%	15,96%	99,74%

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	16,5	9,44	143%
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	130	65,13	150%
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,08	1,57	145,54%
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:103	1:94	91%
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	75%	100,00%	133,33%
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	70,95	71,14	100,27%

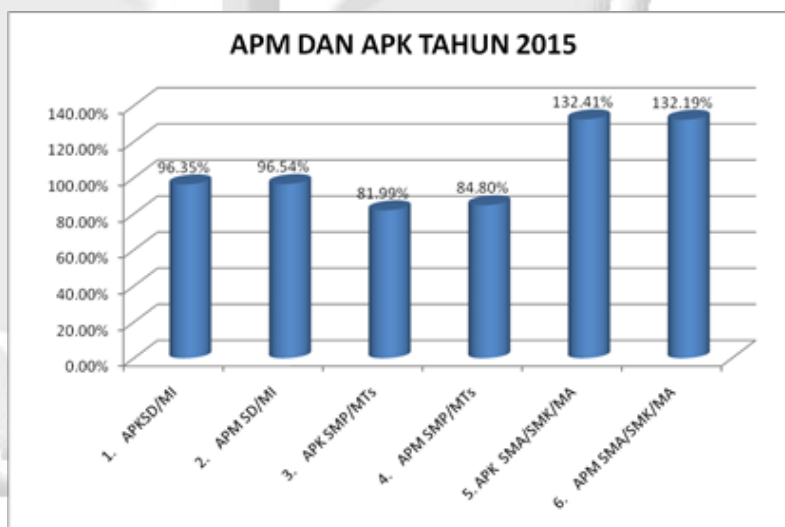
1. Sasaran Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan indikator :
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, dengan formula indikator jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-12 tahun X 100%, tercapai 96,35% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99,63% dengan realisasi 95,99% atau sejumlah 79.178 siswa SD dibanding 82.487 jumlah penduduk usia SD.
 - b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, dengan formula indikator Jumlah penduduk usia antara 7-12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, tercapai 96,54% termasuk kategori

Sangat Berhasil, yang berasal dari perhitungan target 88,95% dengan realisasi 85,87% atau sejumlah 70.833 jumlah penduduk usia antara 7-12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dibanding 82.487 jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, dengan formula indikator Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13-15 tahun X 100%, tercapai 81,99% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 93,71% dengan realisasi 76,83% atau sejumlah 33.298 siswa SMP/MTs dibanding 43.339 jumlah penduduk usia SMP/MTs.
- d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, dengan formula indikator jumlah penduduk usia antara 13-15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun, tercapai 84,80% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 69% dengan realisasi 58,52% atau sejumlah 25.360 jumlah penduduk usia antara 13-15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibanding 43.339 jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
- e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA, dengan formula indikator jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 16-18 tahun X 100%, tercapai 132,41% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 88,66% dengan realisasi 117,39% atau sejumlah

46.074 jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibanding 39.248 jumlah penduduk berusia 16-18 tahun.

- f. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA, dengan formula indikator Jumlah penduduk usia antara 16-18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun, tercapai 144,83% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 62,76% dengan realisasi 90,89% atau sejumlah 35.674 jumlah penduduk usia antara 16-18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibanding 39.248 jumlah penduduk usia 16-18 tahun.



- g. Angka Melek Huruf, dengan formula indikator jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas X 100%, tercapai 100,01% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99,9% dengan realisasi 99,91% atau diukur dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis sebesar 681.259 dibanding

jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 681.869.

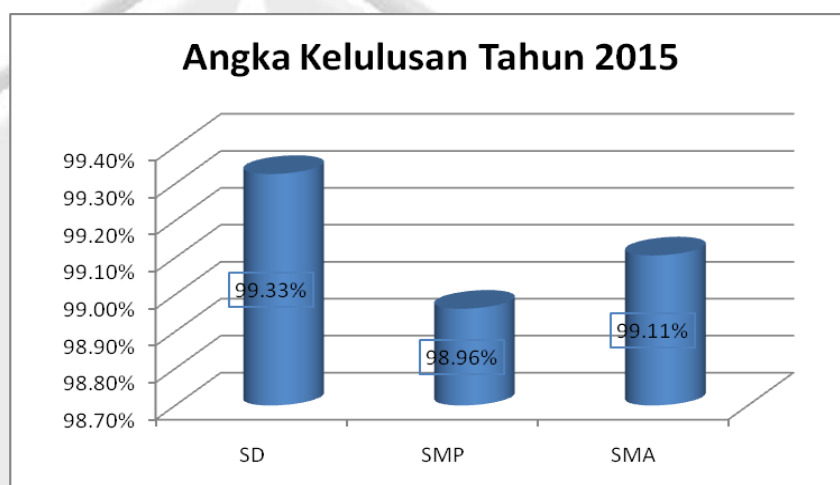


h. Angka Kelulusan, dengan formula indikator jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK) dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran berkenaan X 100%, tercapai :

- SD/MI 99,33% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99,22% dengan realisasi 99% atau diukur dari jumlah kelulusan sebesar 14.288 pada tahun 2015 dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan sebesar 681.869.
- SMP/Mts 98,96% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99,64% dengan realisasi 99% atau diukur dari jumlah kelulusan sebesar 11.950 pada tahun 2015 dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi

pada masing-masing jenjang pendidikan sebesar 12.119.

- SMA/MA, SMK 99,11% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99,31% dengan realisasi 98% atau diukur dari jumlah kelulusan sebesar 15.719 pada tahun 2015 dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan sebesar 15.971.



- Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs, tercapai 99.74%, dengan kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 16% dengan realisasi 15,96% atau diukur dari anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs sejumlah 3.548 siswa lulus kelas 9 SMP/MTs dibanding 22.232 jumlah siswa pra sejahtera SD sampai SMP/MTs.



Rata-rata capaian sasaran ini adalah 103,12% kategori **Sangat Berhasil**. Keberhasilannya dapat dilihat dari keberhasilan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melek Huruf dan Angka Kelulusan. Permasalahan yang muncul adalah masih belum optimalnya pemerataan sarana prasarana pendidikan, khususnya satuan pendidikan di wilayah Timur Kota Malang, yang berdampak peminat siswa lebih banyak di wilayah 4 (empat) kecamatan yang merupakan wilayah-wilayah pusat keramaian. Solusi yang akan dilakukan adalah peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, untuk diprioritaskan pembangunan sarana pendidikan di wilayah timur Kota Malang, terutama sekolah jenjang SD.

Upaya nyata yang dilakukan melalui antara lain program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan kegiatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta Pendidikan Menengah.

2. Sasaran Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan indikator :
- a. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) dengan formula indikator $\frac{\text{jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 1.000$, tercapai 143% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 16,5 dengan realisasi 9,44 atau sejumlah 116 kematian bayi dibanding 12.284 kelahiran hidup.
 - b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dengan formula indikator $\frac{\text{banyaknya kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas}}{\text{jumlah ibu hamil, melahirkan dan nifas}} \times 100.000$ KH, tercapai 150% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 130 dengan realisasi 65,13 atau sejumlah 8 kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas dibanding 12.284 ibu hamil, melahirkan dan nifas.
 - c. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk) dengan formula indikator $\frac{\text{jumlah tenaga medis}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1.000$ tercapai 145,54% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1,08 dengan realisasi 1,57 atau sejumlah 1.385 tenaga medis dibanding 881.123 jumlah penduduk.
 - d. Rasio Posyandu per Satuan Balita dengan formula indikator $\frac{\text{jumlah posyandu}}{\text{jumlah balita}} \times 1.000$ tercapai 91% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1:103 dengan realisasi 1:94 atau sejumlah 653 posyandu dibanding 61.515 jumlah balita.

- e. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dengan formula indikator jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dibagi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin X 100%, tercapai 133,33% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 75% dengan realisasi 100,00% atau sejumlah 139.423 penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis disbanding 139.423 jumlah penduduk miskin .



- f. Angka Usia Harapan Hidup (AHH), tercapai 100,06% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 70.95 dengan realisasi 71,14.

2) Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor ekonomi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi sehat	49,61%	38,06%	76,7%
	2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	54,51%	35,86%	65,78%
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	39,92%	37,67%	94,37%
	2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	32,02%	22%	67,16%

1. Sasaran Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM dengan indikator :

- a. Persentase koperasi sehat, dengan capaian 76,7% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 49,61% dengan realisasi 38,06%.
- b. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB, dengan capaian 65,78% termasuk kategori Cukup Berhasil, yang berasal dari perhitungan target 54,51% dengan realisasi 35,86%.

2. Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata, dengan indikator :
 - a. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB, tercapai 94,37%;
Capaian ini diukur dari realisasi 37,67% dari target 39,92%.
 - b. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB, tercapai 67,16%, dari perhitungan target 32,02% dengan realisasi 22%.

Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,90%	1,76%	174,47%
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	77,50%	51%	66,02%
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	5,00%	2,90%	57,97%

1. Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator :
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tercapai 174,47%, capaian ini diukur dari realisasi TPT 1,76% dari target 6,90%.
 - b. Tingkat partisipasi angkatan kerja, tercapai 66,02%, capaian ini diukur dari realisasi 51% dari target 77,50%.

Keberhasilan sasaran ini didukung Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota yaitu digelarnya Job Market Fair yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Dalam kegiatan yang digelar bekerja

sama dengan perusahaan lokal dan nasional tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di wilayah kota Malang.



2. Sasaran Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah dengan indikator :
 Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah, tercapai 57,97%;
 Capaian ini diukur dari realisasi 2,90% dari target 5%.

Tujuan 3 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAAN
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	10,86	8,86	82%

Sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*) dengan indikator :
 Ketersediaan pangan (*food availability*), tercapai 82%%.
 Capaian ini diukur dari realisasi *food availability* 8,86 dari target 10,86.

3) Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	4,27%	4,20%	101,59%
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	15%	18,87%	125,78%
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%

1. Sasaran Menurunnya persentase penduduk miskin dengan indikator :

Angka kemiskinan, dengan capaian 96,82% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 4,27% dengan realisasi 4,20%.

2. Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial, dengan indikator :

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan, tercapai 125,78%;

Capaian ini diukur dari realisasi 18,87% dari target 15%. Keberhasilan sasaran ini didukung dengan

Kegiatan dalam bentuk Bimbingan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB) melalui Pembinaan dan Pelatihan Penanganan bagi Orang Tua Anak (*Family Support and Parenting Skill*). Dimana dengan kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada orang tua maupun keluarga tentang hak anak disabilitas (cacat), mencegah timbulnya kecacatan baru bagi anak, meningkatkan kepercayaan diri dan keceriaan anak disabilitas dalam menjalani perawatan/rehabilitasi medis dan sosial serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup anak disabilitas.

3. Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana, dengan indikator :

Persentase korban bencana yang tertangani, tercapai 100%;

Capaian ini diukur dari realisasi 100% atau seluruh korban bencana secara keseluruhan dapat tertangani, dengan target 100%.

Keberhasilan sasaran ini didukung dengan kegiatan penanganan korban bencana yang dilaksanakan setiap terjadi bencana yang senantiasa dilakukan penanganan dan pemberian bantuan oleh Pemerintah Kota Malang kepada masyarakat yang tertimpa bencana.



Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan kemiskinan

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	74,09	72,99	98,52%
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,09	72,99	98,52%
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	15,00%	17%	111,11%

1. Sasaran Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender dengan indikator :

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG), tercapai 98,52%;

Capaian ini diukur dari realisasi IPG 72,99 dari target 74,09.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), tercapai 102,93%;

Capaian ini diukur dari realisasi IDG 78,75 dari target 76,51.

Rata-rata capaian sasaran ini adalah 101% kategori

Sangat Berhasil.

2. Sasaran Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan indikator :

a. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti, tercapai 100%;

Capaian ini diukur dari realisasi 100% tindak lanjut dari kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama dari target 100%.

b. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA, tercapai 111,11%;

Capaian ini diukur dari realisasi 17% dari target 15%.

Rata-rata capaian sasaran ini adalah 100% yang dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	10,00%	28,41%	284,15%
	2. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	5,00%	4,37%	87,45%

Sasaran Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dengan indikator :

a. Persentase penurunan angka kriminalitas, tercapai 284,15%.

Capaian ini diukur dari realisasi penurunan angka kriminalitas 28,41% dari target 10%.

- b. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda, tercapai 87,45%.

Capaian ini diukur dari realisasi 4,37% dari target 5%.

Rata-rata capaian sasaran ini adalah 185% yang dalam kategori Sangat Berhasil.

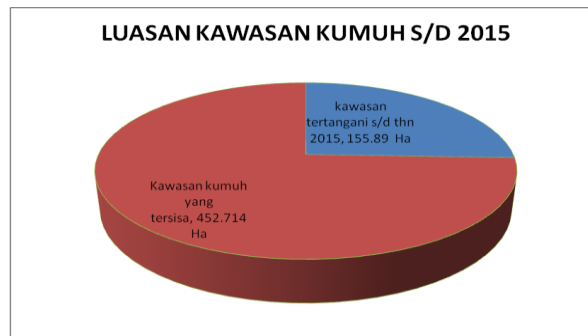
4) Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	520,00	550,10	94,21%
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	95%	98%	104%
	3. Persentase layanan air bersih	86%	64%	75,23%

Sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan, dengan indikator :

- a. Luasan kawasan kumuh, dengan formula indikator Jumlah seluruh luasan kawasan kumuh, tercapai 94,21% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 520 Ha, dengan realisasi 550 Ha.



- b. Persentase jalan kota dalam kondisi baik, dengan formula indikator Jumlah kumulatif panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang dibagi jumlah kumulatif panjang jalan X 100%, tercapai 104% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 95%, dengan realisasi 98% atau panjang jalan dalam kondisi baik 138,50 km dibanding panjang jalan keseluruhan 140,78 km.



- c. Persentase layanan air bersih, dengan formula indikator Jumlah KK yang mendapat pelayanan air bersih dibagi jumlah seluruh KK X 100%, tercapai 75,23% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 86%, dengan realisasi 64% atau 176.751 KK yang mendapat pelayanan air bersih dibanding 220.431 KK.



Rata-rata capaian sasaran ini adalah 91% kategori **Sangat Berhasil**.

Keberhasilannya dapat dilihat dari keberhasilan dalam menurunkan luasan kawasan kumuh dari 614,7 pada tahun sebelumnya menurun 11% menjadi 550,1 Ha. Sedangkan pemeliharaan jalan yang dilakukan memberikan dampak yang signifikan dalam memberikan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam menggunakan fasilitas jalan.

Sedangkan pelayanan sarana air bersih diprioritaskan melalui program 100-0-100 yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yaitu pencapaian target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program tersebut, salah satunya tersirat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Merdeka Malang.

Permasalahan yang muncul adalah masih belum optimalnya pemerataan air bersih untuk seluruh keluarga. Untuk kawasan-kawasan pada daerah tinggi, kebutuhan air bersih ini cukup sulit dipenuhi.

Solusi yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan suplai air bersih bagi masyarakat dengan debit air yang cukup memadai. Upaya nyata yang dilakukan melalui antara lain program efektivitas dan efisiensi penyediaan

tendon-tandon air di dataran tinggi dan pipanisasi, yang mampu memberikan distribusi aliran air bersih pada tiap tiap rumah tinggal.

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	15,94%	10,93%	68,60%
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	95%	100%	105,3%
	4. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	100%

Sasaran Meningkatkan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya, dengan indikator :

- a. Persentase luasan RTH, dengan formula indikator Luasan ruang terbuka hijau dibagi luasan wilayah X 100%, tercapai 68,60% termasuk kategori **Kurang Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 15,94%, dengan realisasi 10,93% atau 1.203,5 Ha luasan ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah 11.006 Ha.
- b. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani, dengan formula indikator jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani dibagi jumlah seluruh pelanggaran tata ruang X 100%, tercapai 105,3% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 95%, dengan realisasi 100% dengan jumlah pelanggaran 1983.

- c. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya, dengan formula indikator Jumlah pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan peruntukannya dibagi jumlah seluruh wilayah yang telah dimanfaatkan x 100%, tercapai 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 100%, dengan realisasi 100%.

5) Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	3	0%	0%
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	65	61,91	95,25%
	3. Opini BPK	WTP	WTP	100%

Sasaran Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator :

- a. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK, dengan capaian 0% termasuk kategori Tidak **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 3 SKPD yang ditetapkan sebagai WBK dengan realisasi 0 SKPD.

Ketidakberhasilan ini bukan berarti tidak ada kinerja yang dihasilkan dari Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Malang, hal tersebut karena belum adanya Penetapan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PAN & RB terhadap

SKPD sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pemerintah Kota Malang telah mencanangkan 3 SKPD sebagai *Pilot Project* WBK dan telah melakukan evaluasi terhadap capaian 3 SKPD tersebut dalam memenuhi indikator sebagai WBK. Hasil evaluasi telah disampaikan kepada Kementerian PAN & RB untuk dilakukan penilaian menjadi WBK. Namun sampai dengan berakhirnya tahun 2015 belum ada penilaian dan penetapan terhadap 3 SKPD tersebut untuk menjadi WBK.



- b. Nilai SAKIP Kota Malang, dengan capaian 95,25% termasuk kategori Sangat Berhasil, dimana dari target nilai SAKIP 65 terealisasi 61,91.

Keberhasilan ini didukung dengan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, yaitu kegiatan evaluasi SAKIP dan Bimtek Penyusunan Renstra, kegiatan Bimtek dan FGD RKPD dan Reviu RPJMD yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian PAN & RB.

- c. Opini BPK, dengan capaian 100%, dengan kategori Sangat Berhasil, dimana dari target opini WTP terealisasi WTP.

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	77,16	79,56	103,11%

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan indikator :

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan capaian 103,11% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 77,16 nilai SKM terealisasi 79,56.

Capaian keberhasilan ini didukung komitmen Pemerintah Kota Malang dalam mematuhi ketentuan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan. Dari hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Kota Malang menduduki peringkat tertinggi untuk kabupaten/kota dalam menjalankan standar pelayanan publik, yaitu merupakan kota yang mempunyai kepatuhan sedang (kategori kuning). Sedangkan dari hasil penilaian Kementerian PAN & RB Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu *role model* dalam pelaksanaan

pelayanan publik terutama dalam upaya menjalankan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	93,92%	95,99%
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	82,46%	85,87%
	4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	93,16%	76,83%
	5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	68,90%	58,52%

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	93,83%	117,39%
	7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	69,99%	90,89%
	8. Angka Melek Huruf	97,51%	99,91%
	9. Angka Kelulusan - SD - SMP - SMA	99,89% 97,07% 96,63%	99% 99% 98%
	10. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	15,96%	15,96%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	15,75	9,44
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	97,97	65,13
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,94	1,57
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:100	1:94

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	100%	100,00%
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	71,14	71,14

Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi sehat	38%	38,06%
	2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	54,81%	35,86%
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	39,86%	37,67%
	2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	11,55%	22%

Tujuan 1 : Meningkatnya kesempatan kerja

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,73	1,76
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,74%	51%
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	3,47%	2,90%
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	8,13	8,86

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	4,73	4,20
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	5,19%	18,87%
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	72,24	72,99
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,41	78,75
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti.	100%	100%
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	0%	17%

Tujuan 3 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	10,92%	28,41%
	2. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	4%	4,37%

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	608,6	550,10
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	97%	98%
	3. Persentase layanan air bersih	62%	64%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	12,39%	10,93%
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	100%	100%
	3. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	100%	100%

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	0	0
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	57,69	61,91
	3. Opini BPK	WTP	WTP

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	REALISASI 2015
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	79,56

4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen yang Merupakan Kemajuan Pencapaian Target Jangka Menengah

Kemajuan pencapaian target jangka menengah adalah kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, sedangkan Capaian Kinerja jangka menengah adalah tahapan membandingkan antara Realisasi **sampai dengan** Tahun 2015 dibandingkan target lima tahunan.

Capaian kinerja jangka menengah yang merupakan tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	95,99%	99,63%	96,35%
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	85,87%	0,89	96,45%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	76,83%	95,01%	80,87%
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	58,52%	72%	81,27%
	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	117,39%	100,00%	117,39%
	6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	90,89%	68,76%	132,19%
	7. Angka Melek Huruf	99,91%	99,95 %	99,96%
	8. Angka Kelulusan			
	- SD	99%	99,25%	99,30%
	- SMP	99%	99,68%	98,92%
	- SMA	98%	100%	98,42%
	9. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	15,96%	16%	99,74%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	9,44	15	137,05%
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	65,13	120	145,73%
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,57	1,12	140,34%
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:94	1:101	95,65%
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	100,00%	78%	128,21%
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	71,14	71,10	100,06%

Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi sehat	38,06%	62,34%	61,06%
	2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	35,86%	54,87%	65,35%
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	37,67%	40,04%	94,09%
	2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	22%	32,02%	67,16%

Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,76%	6,59%	173,27%
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	51%	85%	60,20%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	2,90%	5%	57,97%

Tujuan 3 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	8,86	11,01	80,48%

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	4,20%	3,10%	64,45%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	18,87%	21%	89,84%
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	72,99	76,49	95,42%
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,75	78,91	99,80%
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	17%	15%	111,1%

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	28,41%	10%	284,1%
	2. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	87,45%	5%	87,4%

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	550,10	80,00	8,4%
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	98,38%	98%	100,4%
	3. Persentase layanan air bersih	64%	95%	67,7%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	10,93%	15,97%	68,5%
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	100%	95%	105,3%
	3. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	100,0%

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	0	6	0%
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	61,91	68	91%
	3. Opini BPK	WTP	WTP	100%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2015	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,56	78,66	101,1%



5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Daerah Sekitar

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN DAERAH SEKITAR		
		KOTA MALANG	KAB. MALANG	KOTA BATU
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	95,99%	109,80%	108,77 %
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	85,87%	99,32%	98.35%
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	76,83%	96,39%	118,22%
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	58,52%	79,83%	98,49%
	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	117,39%	59,34%	79,16%
	6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	90,89%	47,38%	66,95%
	7. Angka Melek Huruf	99,91%	98,82%	98,40%
	8. Angka Kelulusan :			
	- SD	99%	99,88%	99,76%
	- SMP	99%	99,46%	92,97%
	- SMA	98%	99,15%	100%

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN DAERAH SEKITAR		
		KOTA MALANG	KAB. MALANG	KOTA BATU
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	142,7%	95%	93,42%
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	149,9%	94,52 %	100%
	3. Rasio Posyandu per Satuan Balita	91,26%	110,76%	112,62%
	4. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	71,14	74	70,51
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	Persentase koperasi sehat	76,73%	91%	38%
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,76%	4,45%	2,43%
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	4,20%	11,48%	4,77%
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	72,99	67,53	66,56
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,75	70,45	76,10

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN DAERAH SEKITAR		
		KOTA MALANG	KAB. MALANG	KOTA BATU
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	100%	100%	100%
	2. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	100%

Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh Pemerintah Kota Malang selama Tahun 2015 sebagai berikut :

1. **PERPAMSI AWARD 2015** - dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (*Indonesian Water Supply Association*) untuk penghargaan Pelayanan Terbaik Air Minum dan Sanitasi



2. **Top 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015** - dari Kementerian PANRB RI untuk penghargaan **Inovasi Pelayanan Publik 2015** yang diberikan kepada Bank Sampah Malang dengan Inovasi "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah Kota Malang"

3. **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan



4. **Adiwiyata Mandiri : SMPN 10, SMPN 14 dan SD Plus Al-Kautsar** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5. **Piala Adipura Tahun 2015** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



6. **Kabupaten / Kota Layak Anak 2015** Kategori Madya Kota Malang 2015 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. **Program Nasional Penanganan Pemukiman Kumuh** (100-0-100) Tahun 2015 – 2019 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. **Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas** Tahun 2015 dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Peringkat III Kategori Kota Besar)
9. **Swasti Saba Wistara** dari Menteri Kesehatan



9. **Penghargaan kepada Kabupaten dan Kota yang berprestasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung** untuk kategori Kota Besar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2015 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015			
Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	1.876.858.611.232,58	1.829.071.281.131,06	97,45%
Belanja Daerah	2.132.444.361.610,25	1.803.419.132.331,33	84,57%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah, pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.876.858.611.232,58 dan realisasi sebesar Rp. 1.829.071.281.131,06 (97,45%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015
(dalam Rp.)

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	363.978.160.111,08	424.937.346.938,06	116,75
2.	Dana Perimbangan	973.435.515.890,50	926.364.574.783,00	95,16
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	539.444.935.231,00	477.769.359.410,00	88,57
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.876.858.611.232,58	1.829.071.281.131,06	97,45

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 363.978.160.111,08 dan realisasi sebesar Rp. 424.937.346.938,06 (116,75%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015
(dalam Rp.)

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1.	Hasil Pajak Daerah	272.000.000.000,00	316.811.730.702,76	116,47
2.	Hasil Retribusi Daerah	40.495.709.448,90	35.281.817.931,00	87,12
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.007.389.861,34	14.649.144.871,14	97,61
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.475.060.800,84	58.194.653.433,16	159,55
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		363.978.160.111,08	424.937.346.938,06	116,47

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 973.435.515.890,50 dan realisasi/penerimaan sebesar Rp. 926.364.574.783,00 (95,16%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Dana Perimbangan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015
(dalam Rp.)

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	132.833.762.890,50	87.015.121.783,00	65,51
2	Dana Alokasi Umum	818.758.893.000,00	818.758.893.000,00	100
3	Dana Alokasi Khusus	21.842.860.000,00	20.590.560.000,00	94,27
	Jumlah Dana Perimbangan	973.435.515.890,50	926.364.574.783,00	95,16

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya tahun anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp. 539.444.935.231,00 dengan realisasi sebesar Rp. 477.769.359.410,00 atau 88,57 %.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2015

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1.	Pendapatan Hibah	74.400.000.000,00	14.781.000.000,00	19,87
2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	154.505.481.231,00	152.348.658.410,00	98,6
4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	224.002.501.000,00	224.102.748.000,00	100,04
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	86.536.953.000,00	86.536.953.000,00	100
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		539.444.935.231,00	477.769.359.410,00	88,57

Belanja Daerah Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 2.132.444.361.610,25 dengan realisasi sebesar Rp.1.803.419.132.331,33 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 1.057.178.585.513,48 dengan realisasi sebesar Rp.893.713.874.810,81 dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.075.265.776.096,77 dengan realisasi sebesar Rp.896.461.378.526,52 sehingga ada penghematan sebesar Rp.329.025.229.278,92.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	1.057.178.585.513,48	893.713.874.810,81	84,54
1.1.	Belanja Pegawai	980.197.687.813,48	825.456.394.833,37	84,21
1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4.	Belanja Hibah	70.741.630.000,00	66.492.439.819,04	93,99
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	434.500.000,00	397.500.000,00	91,48
1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	100.000.000,00	75.036.600,00	75,04
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	663.728.700,00	635.264.957,40	95,71
1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.041.039.000,00	657.238.601,00	13,04
2.	Belanja Langsung	1.075.265.776.096,77	909.706.228.426,52	84,60
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.132.444.361.610,25	1.803.419.132.331,33	84,57

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

Dari Pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut :

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	165.685.870.100,77	153.975.632.127,00	92,93%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 103,12%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,07%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	101.668.446.482,00	69.232.588.509,42	68,10%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 132%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 31,90%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	13.855.219.500,00	9.263.970.578,00	66,86%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 71,26%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 33,14%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	24.839.307.000,00	19.082.923.866,00	76,83%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 80,77%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 23,17%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kesempatan kerja	31.794.630.455,00	6.464.408.550,00	20,33%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 120%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 79,67%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	2.519.500.000,00	2.295.742.100,00	91,12%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 57,97%, dengan kategori **Kurang Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,88%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	8.504.055.000,00	6.594.858.816,00	77,55%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 82%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 22,45%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial	Menurunnya penduduk miskin	5.913.831.442,00	3.750.751.853,00	63,42%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 101,59%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 36,58%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	6.168.609.320,00	2.868.848.667,00	46,51%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 125,78%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 53,49%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	1.621.880.000,00	1.556.062.481,00	95,94%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 100%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,06%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.	10.585.000.000,00	8.293.792.087,00	78,35%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 100,72%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,65%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	15.924.294.180,00	15.056.447.057,00	94,55%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 105,56%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,45%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	11.844.856.225,00	11.174.663.605,00	94,34%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 185,80%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,66%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	310.171.941.000,00	290.208.297.461,00	93,56 %

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 91%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,44%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	34.620.913.550,00	31.514.079.043,00	91,03%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 91,29%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,97%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	28.240.303.900,00	24.870.032.807,00	88,07%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 65%, dengan kategori **Cukup Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 11,93%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	301.307.117.942,00	253.503.128.819,10	84,13%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 103,11%, dengan kategori **Cukup Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,87%.

Secara umum dari masing-masing sasaran telah tercapai dengan kategori **Berhasil** dengan menggunakan anggaran Rp. 909.706.228.426,52 dari pagu anggaran Rp. 1.075.265.776.096,77, sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 165.559.547.670,25 atau 15,40%.

C. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Pada Misi 1 Sasaran Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan meskipun capaiannya dalam kategori Berhasil, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Pengelolaan anggaran pendidikan khususnya penyaluran dana bantuan bagi siswa miskin dan dana tunjangan profesi guru maupun penyediaan sarana prasarana pendidikan rawan terjadi penyimpangan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Malang telah berkomitmen untuk mengawal dan melaksanakan pengelolaan anggaran pendidikan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui Program Pembangunan Integritas sektor Pendidikan yang ditandai dengan pendeklarasian dan penandatanganan dokumen Malang Cerdas Berintegritas tanpa Korupsi oleh Walikota Malang dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka mewujudkan program tersebut telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* untuk menyusun rencana aksi dan program kerja dalam rangka pengelolaan anggaran pendidikan yang bersih, transparan dan akuntabel.



Pada Misi 2 indikator persentase koperasi sehat masih belum tercapai maksimal karena sedikitnya 365 dari 767 koperasi yang beroperasi di wilayah Kota Malang saat ini berkategori "mati suri" sebab sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan perkoperasian. Koperasi yang berkategori mati suri tersebut juga sudah tidak aktif karena selama dua tahun

berturut-turut tidak melakukan kegiatan perkoperasian, termasuk Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan tidak memiliki badan usaha. Untuk mengatasi ratusan koperasi yang mati suri tersebut, telah dilakukan verifikasi lapangan untuk menemukan penyebab permasalahan terhadap koperasi yang tidak sehat tersebut, kemudian dilakukan pendampingan pada koperasi bersangkutan, termasuk dalam hal manajerial, pelatihan dan pembinaan hingga koperasi bersangkutan benar-benar sehat dan kuat. Namun bagi koperasi yang benar-benar tidak sehat maka akan diproses pembubarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Misi 5 sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada indikator Jumlah SKPD yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) masih belum dapat tercapai karena belum dilaksanakannya Penilaian oleh Tim Nasional sehingga belum bisa ditetapkan sebagai WBK terhadap SKPD yang telah dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Internal Pemerintah Kota Malang. Sebagai langkah selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Malang akan melaksanakan penilaian mandiri terhadap SKPD *pilot project* WBK pada semester satu tahun bersangkutan agar pada pertengahan semester dua dapat dilakukan penilaian oleh Tim Nasional secara tepat waktu. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut pada tahun 2016 telah direncanakan kegiatan Pembangunan Zona Integritas yang didalamnya akan dilaksanakan pembinaan terhadap SKPD *pilot project* agar di lingkungan SKPD-nya dipenuhi indikator pengungkit dan indikator hasil menuju kriteria SKPD Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sebagaimana Bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Berhasil. Meskipun belum seluruh indikator mencapai target yang telah ditetapkan, sebagian besar indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan menunjukkan keberhasilan pencapaian dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian kinerja pada tahun 2015 juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari capaian tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang terkait, seperti halnya dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada indikator nilai SAKIP Kota Malang yang telah mencapai nilai B memerlukan kerja sama yang intensif dan sinergis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan asistensi dan konsultansi untuk pencapaian indikator tersebut.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Malang yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Malang.

Malang, 23 Maret 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd

H. MOCH. ANTON

